

Abstrak

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan hasil evaluasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Peraturan Pemerintah ini memberikan keadilan kepada Wajib Pajak serta mendorong masyarakat untuk aktif dalam kegiatan ekonomi, seperti Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap pertumbuhan PPh Final UMKM dan tingkat kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) di KPP Pratama Bengkalis. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dan metode studi lapangan dengan melakukan wawancara kepada seorang Account Representative dari Seksi Pengawasan III di KPP Pratama Bengkalis. Data penelitian diperoleh dari Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi Kanwil DJP Riau. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terjadi penurunan kontribusi penerimaan PPh Final melalui tarif pajak 0,5% meskipun terdapat kenaikan jumlah Wajib Pajak UMKM terdaftar, dan kepatuhan pelaporan SPT di KPP Pratama Bengkalis tidak berpengaruh signifikan karena masih tergolong rendah dengan kendala, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap aturan perpajakan yang berlaku dan minimnya pengetahuan masyarakat terkait aplikasi *online* perpajakan seperti DJP Online. Oleh sebab itu, KPP Pratama Bengkalis terus berupaya untuk lebih rutin melakukan sosialisasi ke Wajib Pajak UMKM, lebih memanfaatkan era digitalisasi saat ini, dan meningkatkan pengawasan atau penggalan potensi kepada Wajib Pajak UMKM demi tercapainya target penerimaan pajak.

Kata kunci: Peraturan Pemerintah, UMKM, Pajak Penghasilan (PPh) Final, Surat Pemberitahuan (SPT), Wajib Pajak.

Abstract

Government Regulation Number 23 of 2018 is the result of an evaluation of Government Regulation Number 46 of 2013 which aims to provide convenience to Taxpayers in carrying out their tax obligations. This Government Regulation provides justice to taxpayers and encourages the public to be active in economic activities, such as Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). This study aims to determine the effect of the application of Government Regulation Number 23 of 2018 on the growth of MSME Final PPh and the level of compliance in reporting Notification Letters (SPT) at KPP Pratama Bengkalis. This research uses literature study method and field study method by interviewing an Account Representative from Supervision Section III at KPP Pratama Bengkalis. The research data was obtained from the Service Guidance and Consultation Section of the Riau Regional Tax Office. The results of the study concluded that there was a decrease in the contribution of Final PPh revenue through a 0.5% tax rate even though there was an increase in the number of registered MSME taxpayers, and SPT reporting compliance at KPP Pratama Bengkalis had no significant effect because it was still relatively low with constraints, namely the lack of public awareness of the rules. applicable taxation and the lack of public knowledge regarding online tax applications such as DGT Online. Therefore, KPP Pratama Bengkalis continues to strive for more routine socialization to MSME Taxpayers, making more use of the current digitalization era, and increasing supervision or exploring potential for MSME Taxpayers in order to achieve tax revenue targets.

Keywords: Government Regulations, MSMEs, Final Income Tax (PPh), Notification Letters (SPT), Taxpayers.